

## **PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KADUJAYA JATIGEDE SUMEDANG**

**Maulidia Sri Aprilliani<sup>1)</sup>**

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kapasitas perangkat desa dalam akselerasi pembangunan infrastruktur di Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perangkat desa belum optimal, ditinjau dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Permasalahan utama meliputi keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dan tahapan pembangunan, rendahnya kemampuan teknis dan manajerial, serta kurangnya konsistensi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Selain itu, hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada belum maksimalnya kualitas hasil pembangunan serta keterlambatan pelaksanaan program di lapangan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan upaya berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis, peningkatan disiplin kerja, serta penguatan koordinasi dan pengawasan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa agar pembangunan infrastruktur berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** kapasitas perangkat desa, pembangunan infrastruktur, keterampilan, pengetahuan, sikap.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the capacity building of village officials in accelerating infrastructure development in Kadujaya Village, Jatigede Subdistrict, Sumedang Regency. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection was conducted through literature review and field research in the form of observation, interviews, and documentation, involving village officials and community leaders as informants. The results of the study indicate that the capacity building of village officials has not been optimal, as assessed in terms of knowledge, skills, and attitudes. The main issues include limited understanding of regulations and development stages, low technical and managerial capabilities, as well as a lack of*

*consistency and accountability in program implementation. Additionally, the obstacles faced include budget constraints, the quality of human resources, and weak coordination among stakeholders. The impact of these conditions is evident in the suboptimal quality of development outcomes and delays in program implementation in the field. The study's conclusion emphasizes that sustained efforts are needed through training, technical guidance, improved work discipline, and strengthened coordination and oversight to enhance the capacity of village officials so that infrastructure development proceeds more effectively, is targeted appropriately, and aligns with community needs.*

**Keywords:** *capacity of village officials, infrastructure development, knowledge, skills, attitude.*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keberhasilan pembangunan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas perangkat desa sebagai pelaksana utama di tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa.

Di Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, terbatasnya kemampuan teknis dan manajerial, serta lemahnya monitoring dan evaluasi. Selain itu, konsistensi dalam menjalankan program sesuai dengan dokumen perencanaan dan tanggung jawab terhadap kualitas hasil pembangunan juga masih perlu ditingkatkan. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan tugas dan kapasitas yang dimiliki oleh perangkat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan: bagaimana peningkatan kapasitas perangkat desa dalam akselerasi pembangunan infrastruktur di Desa Kadujaya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya peningkatan kapasitas perangkat desa serta mengidentifikasi faktor-faktor

yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori peningkatan kapasitas sumber daya manusia menurut Grindle mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*). Pengetahuan berkaitan dengan pemahaman terhadap kebijakan, regulasi, serta tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keterampilan mencerminkan kemampuan teknis dan manajerial dalam mengelola program pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Sementara itu, sikap mencerminkan komitmen, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menjalankan tugas secara profesional.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur desa, kapasitas perangkat desa memiliki peran strategis karena menjadi pelaksana utama dalam proses pembangunan. Tingkat kapasitas yang memadai akan berpengaruh terhadap kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, serta efektivitas pengawasan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan koordinasi dan pengawasan diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur desa yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peningkatan kapasitas perangkat desa dalam akselerasi pembangunan infrastruktur di Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait pengalaman, persepsi, dan penilaian informan terhadap kualitas pelayanan kesehatan, sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan dan kondisi sarana prasarana. Dokumentasi

digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan penelitian dan sebagai laporan kegiatan.

Berdasarkan metode penelitian yang dimaksud, peneliti berfokus untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai peningkatan kapasitas perangkat desa dalam akselerasi pembangunan bidang infrastruktur di Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Desa Kadujaya, sedangkan subjek penelitian meliputi kepala desa beserta perangkat desa yaitu kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala dusun dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pembangunan infrastruktur desa. Informan ditentukan secara purposive, berdasarkan peran, dan keterlibatan langsung dalam peningkatan kapasitas perangkat desa dalam akselerasi pembangunan bidang infrastruktur.

## **PEMBAHASAN**

Peningkatan kapasitas perangkat desa merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena perangkat desa merupakan aktor utama yang berperan langsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan. Oleh karena itu, tingkat kapasitas yang dimiliki akan sangat menentukan kualitas kebijakan dan program pembangunan yang dihasilkan, khususnya dalam bidang infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perangkat desa telah menjalankan perannya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Berbagai upaya telah dilakukan, baik melalui penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan program pembangunan, maupun koordinasi dengan pihak terkait. Namun demikian, secara kritis masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi pembangunan. Meskipun secara administratif dokumen perencanaan telah disusun, dalam praktiknya masih ditemukan program yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan belum sepenuhnya berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, proses pelaksanaan pembangunan juga belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan, ketidaksesuaian antara target dan capaian, serta belum meratanya hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan tersebut mengindikasikan adanya kendala dalam pengelolaan program pembangunan yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Dari sisi pengawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pengawasan cenderung bersifat reaktif, sehingga berbagai permasalahan yang muncul di lapangan tidak dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Kondisi ini berimplikasi pada kualitas hasil pembangunan yang belum sepenuhnya optimal.

Lebih lanjut, pembahasan ini juga mengungkap adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan prioritas pembangunan yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, program yang dilaksanakan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, sehingga manfaat pembangunan belum dirasakan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan latar belakang pendidikan, serta pengalaman kerja menjadi faktor yang turut memengaruhi kualitas pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, dari sisi

eksternal, keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan pemerintah, serta kurangnya pendampingan teknis menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program pembangunan.

Jika ditinjau secara lebih luas, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis semata, tetapi juga oleh faktor kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat menyeluruh agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan ini memberikan gambaran bahwa peningkatan kapasitas perangkat desa masih menjadi kebutuhan yang mendesak dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur. Upaya peningkatan tersebut perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan, dengan memperhatikan berbagai tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, analisis pembahasan akan diarahkan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peningkatan kapasitas perangkat desa dalam akselerasi pembangunan bidang infrastruktur.

Untuk memahami secara lebih mendalam kondisi tersebut, analisis pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada konsep dimensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menekankan bahwa kapasitas aparatur tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Dalam hal ini, kapasitas perangkat desa dipahami sebagai kemampuan yang mencakup pemahaman terhadap tugas dan regulasi, kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan, serta sikap kerja dalam menjalankan tanggung jawab.

Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*). Ketiga dimensi ini digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji sejauh mana kapasitas perangkat desa dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pada masing-masing aspek.

#### **a.) Pengetahuan (*Knowledge*)**

Dimensi pengetahuan dalam peningkatan kapasitas perangkat desa berperan sebagai fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pengetahuan mencakup pemahaman terhadap regulasi, prosedur, serta mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Dalam konteks ini, tingkat pengetahuan perangkat desa menjadi faktor penentu dalam menghasilkan perencanaan yang sistematis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, perangkat desa di Desa Kadujaya secara umum telah memiliki pemahaman dasar terkait regulasi pembangunan desa, seperti penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes. Pemahaman ini menunjukkan bahwa secara administratif perangkat desa telah mampu mengikuti ketentuan formal yang berlaku dalam sistem perencanaan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penguasaan regulasi merupakan prasyarat awal dalam mendukung tata kelola pembangunan desa yang efektif.

Namun demikian, jika dianalisis secara lebih kritis, pengetahuan yang dimiliki perangkat desa masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya aplikatif. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan realisasi program di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap regulasi belum diikuti dengan kemampuan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam program yang tepat sasaran. Dengan kata lain, pengetahuan yang dimiliki belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kemampuan analitis dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala dalam memahami sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan kebijakan prioritas anggaran dari pemerintah. Dalam praktiknya, perangkat desa seringkali dihadapkan pada situasi di mana aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya dapat diakomodasi karena harus menyesuaikan dengan program prioritas yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perangkat desa dalam mengelola dinamika kebijakan

anggaran masih terbatas, sehingga berdampak pada tertundanya pelaksanaan beberapa program infrastruktur.

Jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan desa yang partisipatif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pengetahuan perangkat desa belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan pendekatan bottom-up dengan kebijakan top-down. Padahal, integrasi tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Ketidaksinkronan ini pada akhirnya berdampak pada efektivitas pembangunan serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan.

Keterbatasan pengetahuan juga terlihat dalam kemampuan perangkat desa dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan. Dalam beberapa kasus, perangkat desa masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem atau regulasi baru, yang berdampak pada keterlambatan dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pengetahuan yang dimiliki belum bersifat adaptif terhadap perkembangan kebijakan yang terus berubah.

Meskipun demikian, upaya peningkatan pengetahuan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran dari perangkat desa untuk meningkatkan kapasitasnya. Namun, efektivitas kegiatan tersebut masih perlu ditingkatkan, mengingat belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pengetahuan perangkat desa di Desa Kadujaya telah memenuhi aspek dasar, tetapi belum mencapai tingkat yang optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas pada dimensi pengetahuan masih perlu diarahkan pada penguatan kemampuan analitis, integratif, dan adaptif.

#### **b.) Keterampilan (*Skills*)**

Dimensi keterampilan dalam peningkatan kapasitas perangkat desa berkaitan dengan kemampuan teknis dan manajerial dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Keterampilan ini mencakup kemampuan dalam menyusun perencanaan anggaran, mengelola pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program pembangunan. Keberadaan keterampilan yang memadai menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Keterampilan perangkat desa di Desa Kadujaya secara umum masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala dalam pengelolaan pelaksanaan pembangunan, baik dari aspek teknis maupun administratif. Dalam praktiknya, perangkat desa masih menghadapi kesulitan dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dengan kondisi lapangan, sehingga berdampak pada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pembangunan.

Keterbatasan keterampilan juga terlihat dalam pengelolaan anggaran pembangunan. Meskipun perangkat desa telah mampu menyusun dokumen anggaran secara administratif, namun dalam implementasinya masih ditemukan ketidaktepatan dalam pengalokasian sumber daya. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya penggunaan anggaran, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hasil pembangunan. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa keterampilan teknis dalam pengelolaan keuangan desa menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pembangunan.

Selain itu, dalam aspek pelaksanaan kegiatan, masih ditemukan adanya keterlambatan penyelesaian proyek serta ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterampilan dalam manajemen proyek, termasuk perencanaan waktu, pengendalian mutu, dan pengawasan pelaksanaan, belum berjalan secara optimal. Keterbatasan ini berimplikasi pada menurunnya kualitas pembangunan serta belum maksimalnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Pada aspek koordinasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar perangkat desa maupun dengan pihak eksternal belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Koordinasi yang belum terintegrasi menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas, kurangnya sinkronisasi program, serta lemahnya komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterampilan interpersonal dan manajerial perangkat desa masih perlu diperkuat.

Keterampilan dalam melakukan monitoring dan evaluasi juga masih menjadi kendala. Proses pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan cenderung belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Akibatnya, berbagai permasalahan yang muncul di lapangan tidak dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara tepat. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan serta berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya.

Jika dikaitkan dengan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterampilan perangkat desa belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pengelolaan pembangunan yang profesional. Keterampilan yang dimiliki masih berada pada tingkat dasar dan belum berkembang ke arah kemampuan teknis yang lebih spesifik dan aplikatif. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat akselerasi pembangunan infrastruktur di Desa Kadujaya.

Meskipun demikian, perangkat desa telah menunjukkan upaya dalam meningkatkan keterampilannya melalui partisipasi dalam pelatihan dan bimbingan teknis. Namun, efektivitas kegiatan tersebut masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparatur desa. Program peningkatan kapasitas perlu dirancang lebih aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan lapangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi keterampilan perangkat desa di Desa Kadujaya masih memerlukan penguatan yang lebih serius. Peningkatan keterampilan tidak hanya difokuskan pada aspek administratif, tetapi juga pada kemampuan teknis,

manajerial, serta koordinasi. Dengan demikian, perangkat desa diharapkan mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### **c.) Sikap (*Attitude*)**

Dimensi sikap dalam peningkatan kapasitas perangkat desa berkaitan dengan nilai-nilai, etika kerja, serta perilaku aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sikap kerja mencerminkan tingkat kedisiplinan, komitmen, tanggung jawab, serta integritas dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, sikap aparatur desa menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas pelaksanaan program, terutama dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan implementasi.

Sikap kerja perangkat desa di Desa Kadujaya secara umum menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Hal ini terlihat dari keterlibatan perangkat desa dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, secara kritis masih ditemukan beberapa aspek sikap kerja yang belum sepenuhnya optimal.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah masih adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, perangkat desa belum sepenuhnya menjalankan kegiatan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap perencanaan yang telah disusun masih perlu diperkuat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan sistematis.

Selain itu, aspek kedisiplinan juga menjadi perhatian dalam dimensi sikap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kegiatan pembangunan masih terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan maupun penyelesaian pekerjaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kedisiplinan waktu dalam menjalankan tugas belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Dampaknya, pelaksanaan pembangunan menjadi kurang efektif dan berpotensi menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada aspek tanggung jawab, perangkat desa pada dasarnya telah memahami peran dan tugasnya dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, khususnya dalam memastikan kualitas hasil pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam aspek kontrol dan pengendalian kegiatan belum sepenuhnya dijalankan secara optimal.

Dimensi sikap juga berkaitan dengan integritas dan profesionalisme aparatur desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai profesionalisme belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kinerja perangkat desa. Hal ini terlihat dari masih adanya kecenderungan dalam pelaksanaan tugas yang belum sepenuhnya berorientasi pada standar kerja yang jelas dan terukur. Padahal, integritas dan profesionalisme merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Selain itu, sikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi indikator penting dalam dimensi ini. Dalam beberapa kasus, perangkat desa belum sepenuhnya mampu merespons aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pelayanan publik masih perlu ditingkatkan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Jika dikaitkan dengan upaya peningkatan kapasitas, dimensi sikap memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan aspek lainnya. Hal ini dikarenakan sikap kerja yang baik akan memperkuat efektivitas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Sebaliknya, tanpa didukung oleh sikap yang profesional, kemampuan teknis yang dimiliki tidak akan memberikan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi sikap perangkat desa di Desa Kadujaya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, komitmen, serta profesionalisme kerja. Upaya peningkatan kapasitas pada dimensi ini perlu dilakukan melalui pembinaan, penguatan budaya kerja, serta peningkatan kesadaran aparatur terhadap pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Dengan

demikian, perangkat desa diharapkan mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur secara lebih konsisten, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam akselerasi pembangunan infrastruktur di Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah menunjukkan adanya upaya yang cukup nyata melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, musyawarah, serta penguatan koordinasi, disiplin, dan transparansi. Upaya tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja. Namun demikian, pelaksanaan peningkatan kapasitas tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal, mengingat program yang dijalankan masih cenderung bersifat formalitas dan belum didukung oleh sistem evaluasi yang efektif, sehingga hasilnya belum mampu diimplementasikan secara nyata dalam praktik pembangunan. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi dan pengawasan, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan realisasi pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya peningkatan kapasitas telah dilakukan, masih diperlukan penguatan yang lebih berkelanjutan dan terarah pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Kadujaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Irawan. (2019) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau dari Perundang-undangan di Indonesia. Vol 1 No.2. Jurnal Yuridis UNAJA, Universitas Adiwangsa Jambi.

- Azis, N.L. (2016) Otonomi Desa dan Efektivitas Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol 3 No.2. 193-211.
- Danar, O. R., Novita, A. A., Prakasa, Y., & Rachman, F. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7(2), 200-209.
- Dhue, Jennifer I. R., & Tokan, Frans B. (2021). Penguatan Kapasitas Pemerintah dalam Merencanakan Pembangunan Desa di Desa Oben Kabupaten Kupang Warta Governare: *Jurnal Pemerintahan*, 2 (2), 335-355.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the public sectors of developing countries*. Cambridge, MA: Harvard Institute For International Development.
- Hardjanto. (2006) *Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lasmana, H. (2017). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Panggah Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 5 No.2. 9-18.
- Milen, A. (2001). *What do we know about capacity building? An overview of existing knowledge and good practice*. Geneva: World Health Organization.